



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Arpan bin Abdurrahim**, tempat dan tanggal lahir aik gereng, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Aik Gereng, Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

**Ayuni binti Arifin**, tempat dan tanggal lahir alung, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Aik Gereng, Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1979

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diDusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, di mana akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang dihadiri oleh masyarakat setempat dengan saksi-saksi nikah bernama H.Suhaemi dan Abdurrahim, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam (mawaani' an-nikaah) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama : masing-masing bernama :
  - a. H. Zularnaen, laki-laki, umur 34 tahun;
  - b. Rajibul Hadi, laki-laki, umur 30 tahun;
  - c. Mulinartini, perempuan, umur 27 tahun;
  - d. Muliani, perempuan, umur 24 tahun;;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga legalitas pernikahan tersebut sampai saat ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Praya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Miskin (SKTM) Nomor:
8. 48/Kesra/DS.MD/2021, tertanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dapat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyelesaikannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arpan bin Abdurrahim) dengan Pemohon II (Ayuni binti Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1979, di Dusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **RUSTAN BIN SA'I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Dusun Aik Gereng, pada tanggal 31 Desember 1979;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suhaemi dan Abdurrahim;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. H. Zulamaen, laki-laki umur 34 tahun; 2. Rajibul Hadi, laki-laki umur 30 tahun; 3. Mulinartini, perempuan umur 27 tahun; 4. Muliani, perempuan umur 24 tahun;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan hukum yang lainnya;
  - Bahwa sudah cukup;
2. **H. ZULKARNAEN BIN ARPAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendidik, bertempat tinggal di Dusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Pemohon I di Dusun Aik Gereng, pada tanggal 31 Desember 1979;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arifin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Suhaemi dan Abdurrahim;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. H. Zulamaen, laki-laki umur 34 tahun; 2. Rajibul Hadi, laki-laki umur 30 tahun; 3. Mulinartini, perempuan umur 27 tahun; 4. Muliani, perempuan umur 24 tahun;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1979 di Dusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin dengan saksi-saksi nikah bernama H. Suhaemi dan Abdurrahim, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rustan bin Sa'i dan H. Zulkarnaen bin Arpan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pada tanggal 31 Desember 1979 diDusun Aik Gereng,Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arifin dengan saksi-saksi nikah bernama H.Suhaemi dan Abdurrahim, dengan maskawin (mahar) berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra





Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1979 di Dusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Arpan bin Abdurrahim) dengan Pemohon II (Ayuni binti Arifin) yang dilaksanakan pada tanggal 31

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979, diDusun Aik Gereng, Desa Mekar Damai Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2021 Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hannan, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Syafruddin, S.Ag, M.SI**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Hannan, B.A.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 3. Meterai         | : Rp 12.000,00  |
| Jumlah             | : Rp 162.000,00 |

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)